



**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi strata S1 Untuk mencapai gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Dimas Wahyu Aprianto

2118500088

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Wahyu Aprianto.
NPM : 2118500088.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Judul : Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar dibuat dan disusun sendiri bukan buatan hasil karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Tegal, 21 Agustus 2024
Yang Menyatakan



Dimas Wahyu Aprianto
NPM : 2118500088



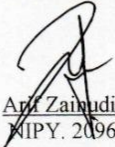
PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

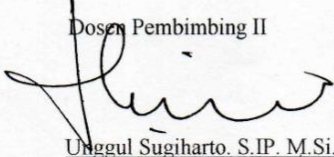
Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I


Arif Zainudin, S.IP., M.IP.
NIPY. 209664101988

Dosen Pembimbing II


Usgegul Sugiharto, S.IP. M.Si.
NIPY. 14251921973.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN (Terakreditasi B)
ILMU KOMUNIKASI (Terakreditasi Baik)
Jl. Haalmahera KM. 1, Telp. (0283)323290, Tegal

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP (DLH) KAB. TEGAL 2022

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi oleh Panitia Ujian Skripsi Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti Tegal

Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Agustus 2024

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si ()
NIP. 196305271988032001
2. Anggota Dewan Penguji : Arif Zainudin, S.IP. M.IP ()
NIPY. 20964101988
3. Anggota Dewan Penguji : Unggul Sugiharto, S.IP. M.Si ()
NIPY. 14251921973

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Unggul Sugiharto, S.IP. M.Si
NIPY. 14251921973
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal sudah mencapai tingkat efektifitas yang sudah diterapkan dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan tantangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal dalam mengatasi permasalahan sampah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sugiono (2012:9) mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal belum berjalan secara efektif.

ABSTRACT

Waste is waste resulting from a production process, both industrial and domestic (household). The main problem with waste management is the government's limited ability to deal with the ever-increasing problem of waste production and collection. In general, only a small amount of waste can be collected and disposed of in the correct way. These waste piles will have bad consequences in the future due to the increasing volume of waste piles.

This research aims to find out whether waste management in Tegal Regency has reached the level of effectiveness that has been implemented and to find out what are the obstacles and challenges for the Tegal Regency Environmental Service (DLH) in overcoming the waste problem.

The type of research used in this research is qualitative. Sugiono (2012:9) expressed his opinion regarding qualitative methods, namely research based on postpositivist philosophy, which is used to examine the condition of natural objects.

The results of this research are that the management carried out by the Tegal Regency Environmental Service has not been effective

MOTTO

**"MANUSIA BOLEH BERENCANA, TAPI SALDO YANG
MENENTUKAN"**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. TEGAL TAHUN 2022”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi strata Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas

Pancasakti Tegal.

4. Bapak Arif Zainudin, S.IP.,M.IP. sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan pengarahannya serta petunjuk-petunjuk yang sangat diperlukan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan saran-saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang pernah diajarkan oleh Bapak/Ibu dosen selama ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa.
8. Kedua orang tua saya Bapak Sugiri dan Ibu Musiam yang tercinta, yang selalu ikhlas memberikan kasih sayang dan dukungan secara moril maupun material, memberikan semangat, doa serta motivasi dengan penuh kesabaran demi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan.
9. Kakakku Evi Widiastuti yang sudah memberikan dukungan tenaga, moril, dan semangat sehingga dapat menyelesaikan program studi ini.

10. Teruntuk Dinda Lisna Ayu Luthfia terimakasih telah ada untuk berbagi semangat, serta waktunya semoga selamanya.
11. Teman-temanku yang telah mendukung, memberi semangat dan memotivasi dalam Penyusunan Skripsi ini.
12. Rekan seperjuangan yang dengan sukarela berpartisipasi dalam Skripsi.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah ataupun perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 5 Maret 2019

Dimas Wahyu Aprianto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| <i>ABTRACT</i> | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Manfaat penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Penelitian Terdahulu | 16 |
| B. Definisi Konsep | 18 |
| 1. Pengertian Efektivitas | 18 |
| 2. Ukuran Efektivitas | 20 |
| 3. Tata Pengelolaan Sampah | 22 |
| 4. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah | 28 |
| C. Pokok Penelitian | 28 |
| D. Alur Pikir | 29 |
| BAB III METODE | 31 |
| A. Jenis dan Tipe Penelitian | 31 |
| B. Lokasi Penelitian | 31 |

| | |
|---|----|
| C. Jenis dan Sumber Data | 32 |
| D. Informan Penelitian | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| F. Teknik Analisa Data | 34 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN | 36 |
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian | 36 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 36 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. Hasil Penelitian | 45 |
| B. Pembahasan | 49 |
| BAB VI PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| LAMPIRAN | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Volume Sampah Terangkut di TPAS Panujah 2017-2022..... | 6 |
| Tabel 2. Sumber Sampah di Kabupaten Tegal..... | 7 |
| Tabel 3. Jumlah Tenaga Harian Lepas..... | 8 |
| Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah..... | 9 |
| Tabel 3. Volume Sampah Terangkut di TPAS Panujah 2021-2023..... | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Alur Pikir..... | 30 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Tegal..... | 44 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Lampiran 1. Daftar Wawancara..... | 60 |
| Lampiran 2. Dokumentasi..... | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya menurut Munadjat Danusaputro. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto , lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup didalamnya.

Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup melaksanakan aktivitas sehari-hari mereka. Tentunya didalam melaksanakan aktivitas tersebut makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat serta suasana yang nyaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya juga membawa dampak perubahan terhadap lingkungan. Perkembangan zaman tersebut diikuti dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat. Salah satu masalah utama saat ini adalah masalah persampahan sebab manusia hidup menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008).

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menekankan tentang perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pada tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan setiap tahunnya sampah di Indonesia terus meningkat mencapai sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg, ini menjadikan Indonesia penghasil sampah terbanyak dengan peringkat kedua di dunia.

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Sistem persampahan yang umum dilaksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan, sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang agar dampak terhadap lingkungan yang diakibatkannya dapat diminimalkan. Masalahnya adalah umumnya sampah yang diangkut tidak menyeluruh, yakni hanya dapat mengangkut sekitar 70-80% saja. Sampah yang tidak terangkut

biasanya akan dibakar, dipendam atau dibuang diselokan maupun di sungai, sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat menyebabkan banjir.

Pemerintah didalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak dalam mengambil keputusan. Pemerintah jika mengambil keputusan yang salah maka pemerintah sendiri yang akan kewalahan di dalam mengatasi persoalan persampahan. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan sampah adalah Kabupaten Tegal. Hal ini dikarenakan jumlah banyaknya sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Menangani persoalan sampah tentu perkara yang tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Tegal karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah baik itu sampah domestik maupun non domestik. Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang untuk menunjang dampak yang baik pada lingkungan, kesehatan, kebersihan serta keindahan.

Untuk meminimalisir terjadinya pengumpulan sampah di Kabupaten Tegal pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu kebersihan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menunjang keindahan wilayah. Oleh sebab itu, penanganan dan pengelolaan sampah dan kebersihan harus diperhatikan lebih serius dalam mencapai kenyamanan bersama. Untuk mencapai kebersihan harus ada keikutsertaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadi penumpukan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan estetika dan pengembangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Sasaran pengelolaan persampahan ini agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif atau baik, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah non-organik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan/pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan tersebut yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Upaya penanganan sampah di Kabupaten Tegal memasuki babak baru. Bupati Tegal Umi Azizah mencanangkan Program Desa Merdeka

Sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Panujah. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, stimulan, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membangkitkan kesadaran publik akan tanggungjawabnya menangani sampah, disamping pula menumbuhkan KSM sebagai wadah tenaga pengelola sampah yang berkompeten di tingkat desa. Pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal baru menggandeng 25 desa dan kelurahan terpilih sebagai prototipe Program Desa Merdeka Sampah. Melalui program tersebut, Pemkab Tegal telah menganggarkan Rp 2,5 miliar yang akan dialokasikan ke masing-masing desa tersebut sebesar 100 Juta. Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala DLH Kabupaten Tegal mengungkapkan jika produksi sampah masyarakat Kabupaten Tegal sudah mencapai 487 ton setiap harinya. Situasi ini telah menempatkan TPA Panujah pada kondisi kritis dan telah melampaui daya tampungnya.

Berikut adalah jumlah volume produksi dan terangkut sampah di Kabupaten Tegal :

Tabel 1. Volume Sampah Terangkut di TPAS Panujah Kec. Kedungbanteng Tahun 2017 s/d 2022.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

VOLUME SAMPAH TERANGKUT
DI TPAS PANUJAH KEC. KEDUNGBANTENG
TAHUN 2017 s/d 2022

| No | Bulan | Tahun | | | | | |
|-----|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 (m2) | 2018 (m2) | 2019 (m2) | 2020 (m2) | 2021 (m2) | 2022 (m2) |
| 1. | Jan | 10.089 | 11.438 | 12.178 | 14.258 | 19.284 | 15.773 |
| 2. | Feb | 9.506 | 10.996 | 11.559 | 13.079 | 17.442 | 15.021 |
| 3. | Maret | 10.961 | 12.790 | 12.248 | 14.283 | 19.477 | 17.071 |
| 4. | April | 10.907 | 11.874 | 12.252 | 16.193 | 18.972 | 15.975 |
| 5. | Mei | 10.753 | 11.910 | 12.503 | 17.135 | 19.561 | 15.697 |
| 6. | Juni | 10.258 | 10.307 | 11.861 | 18.058 | 18.734 | 16.896 |
| 7. | Juli | 11.063 | 12.067 | 12.389 | 18.814 | 18.392 | 15.195 |
| 8. | Agustus | 10.287 | 11.003 | 12.456 | 18.013 | 18.670 | 16.224 |
| 9. | Sept | 10.127 | 10.919 | 12.072 | 18.592 | 18.695 | 15.433 |
| 10. | Okt | 10.555 | 11.658 | 12.120 | 19.003 | 19.095 | 14.735 |
| 11. | Nov | 10.019 | 11.156 | 12.422 | 18.424 | 16.657 | 14.764 |
| 12. | Des | 10.183 | 11.764 | 13.544 | 19.259 | 17.766 | 15.710 |
| | Jumlah | 124.708 | 137.882 | 147.604 | 205.111 | 222.74 | 188.49 |
| | | | | | | 5 | 4 |
| | Perhari | 341,67 | 377,76 | 404,39 | 561,95 | 6187,3 | 516,42 |
| | | | | | | 6 | |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Berdasarkan data tabel di atas, produksi sampah di Kabupaten Tegal dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan volume, hanya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal. Sampah yang diproduksi atau dihasilkan oleh masyarakat tidak hanya dihasilkan oleh satu sumber saja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan volume sampah perharinya bisa mencapai 300-350 ton perhari. Untuk mengurangi penumpukan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menambah frekuensi

pengangkutan sampah hingga dua kali dalam sehari. Berikut kategori sumber penghasil sampah di Kabupaten Tegal :

Tabel 2. Sumber Sampah di Kabupaten Tegal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

SUMBER SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL

| No | Lokasi TPS (Kecamatan) | Jumlah TPS |
|-----|--------------------------|------------|
| 1. | Bumijawa | 3 |
| 2. | Bojong | 2 |
| 3. | Jatinegara | 2 |
| 4. | Balapulang | 10 |
| 5. | Margasari | 5 |
| 6. | Lebaksiu | 15 |
| 7. | Pagerbarang | 3 |
| 8. | Dukuhwaru | 6 |
| 9. | Slawi | 10 |
| 10. | Dukuhturi | 8 |
| 11. | Adiwerna | 10 |
| 12. | Talang | 14 |
| 13. | Suradadi | 4 |
| 14. | Warureja | 1 |
| 15. | Kramat | 26 |
| 16. | Pangkah | 15 |
| 17. | Tarub | 9 |
| 18. | Kedung Banteng | 4 |
| 19. | Tol Pejagan-Pemalang | 1 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Dari sumber sampah diatas menerangkan bahwa lokasi TPS terbanyak terletak di daerah Kramat dan masih banyak daerah yang belum memiliki

TPS, ini menjadi salah satu permasalahan sampah yang belum terselesaikan. Dengan adanya sumber sampah yang sangat banyak di daerah Kabupaten Tegal seharusnya jumlah tenaga serta sarana penunjang lainnya harus lebih ditingkatkan. Berikut adalah jumlah tenaga penanganan sampah di daerah Kabupaten Tegal :

Tabel 3. Jumlah Tenaga Harian Lepas Penanganan Sampah Kabupaten Tegal
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

**JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS PENANGANAN SAMPAH
KABUPATEN TEGAL**

| No | Pekerjaan | Jumlah | | | | |
|----|------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Sopir Truk Pengangkut Sampah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Mandor | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Bongkar Muat | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 4. | Penyapu Jalan | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 5. | Pekerja TPS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | Pekerja TPST | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Sopir Roda Tiga/Tosa | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Administrasi | 25 | 22 | 18 | 10 | 10 |
| | Jumlah | 240 | 233 | 229 | 221 | 221 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Jumlah tenaga dalam penanganan sampah sangat berpengaruh untuk tercapainya lingkungan yang bersih, selain tenaga dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana

sangat penting sebagai alat pendukung dalam menangani dan mengelola permasalahan sampah yang ada. Berikut data tentang sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal :

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

**SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL**

| No | Sarana dan Prasarana | Tahun | | | | | |
|-----|----------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Dump Truck | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Truck Arm Roll | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Truck Tinja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Kontainer Sampah | 30 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Gerobag Dorong | 90 | 102 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| 6. | Gerobag Becak | 32 | 34 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| 7. | Kendaraan Roda Tiga | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | TPS | 93 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 9. | TPST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Komposter | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 11. | Dozer | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| 12. | TPAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Kapasitas kemampuan dari Dump Truck dalam mengangkut sampah adalah sebesar 6-8 ton (2 rit/hari) dengan menggunakan 1 (satu) Dump Truck sarana pengangkut sampah lainnya adalah Arm Roll Truck dengan kapasitas mengangkut sampah sebanyak 4-5 ton (2 rit/hari) dengan menggunakan 1 (satu) Arm Roll Truck.

Dari data tersebut, memaparkan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sudah disediakan namun belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada masih kurang memadai. Berikut permasalahan yang ada pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal :

1. Dump Truck

Unit Dump Truck terakhir pada tahun 2022 di Kabupaten Tegal berjumlah 26, Dump Truck hanya mampu mengangkut sampah berkapasitas 4-5 ton per hari sedangkan volume sampah dengan kapasitas muatan yang dapat diangkut tidak sebanding dengan berbagai sumber sampah yang ada di Kabupaten Tegal setiap harinya.

2. Truck Arm Roll

Truck Arm Roll digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber sampah menuju tempat pembuangan akhir. Penyediaan Truck Arm Roll dari tahun ke tahun tidak pernah bertambah ini

tidak sebanding dengan besarnya jumlah sampah yang ada setiap harinya untuk diangkut melihat banyaknya sumber sampah yang ada di daerah Kabupaten Tegal.

3. Kontainer

Kontainer adalah tempat pembuangan sementara sampah berupa bak sampah besar yang tertutup. Fakta yang sering ditemui dilapangan adalah kontainer sampah dalam keadaan penuh/sesak dengan sampah. Keadaan kontainer yang sudah penuh tentunya berdampak pada sampah yang berceceran disekitar kontainer sampah.

4. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang masih kurang.

Pada tabel diatas jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 berjumlah 117 unit. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dinilai masih belum mampu menangani permasalahan sampah yang ada. Pertama yang menjadi masalah adalah TPS tidak tersebar secara merata. Hal ini disebabkan karena wilayah Geografis Kabupaten Tegal yang cukup luas sehingga menyebabkan beberapa tempat tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Kedua yaitu tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada, seringkali tidak mampu menampung volume sampah yang diproduksi.

ketidakmampuan tersebut yang menyebabkan sampah berceceran di sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

5. Tempat Pembuangan Akhir

Sementara Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 1 unit. Adapun letak tadi TPAS sampah tersebut di Penujah, Kecamatan Kedung Banteng. Hal ini menjadi masalah dikarenakan luas wilayah Kabupaten Tegal tentunya memakan waktu dan biaya yang lebih besar untuk mengangkut dan mengantarkan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS). Volume sampah yang meningkat dari tahun ke tahun tentunya mengakibatkan TPAS yang ada tidak akan sanggup lagi untuk menampung. Hal ini dikarenakan luas dari Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) sampah juga terbatas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal, Muchtar Mawardi mengaku bisa menyelesaikan persoalan sampah di wilayah tersebut. Namun demikian, dibutuhkan anggaran 50 miliar untuk alat ekskavator, lahan, dan armada pengangkutan sampah. Menurutnya, anggaran sebesar 50 Miliar dinilai tidak mungkin dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tegal. Hal itu dikarenakan anggaran Pemkab Tegal terbatas. Tahun ini, alokasi anggaran untuk DLH hanya sekitar Rp 26 miliar yang difokuskan untuk penanganan sampah. Lebih lanjut dikatakan, anggaran hanya bisa digunakan untuk kebutuhan armada truk pengangkut sampah seperti untuk service, ganti oli,

ban dan lainnya. Termasuk juga untuk menyewa alat berat ekskavator yang digunakan untuk meratakan tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Penujah, Kedungbanteng. Ditambahkan, sebenarnya jumlah truk juga masih kurang. Sejatinya, armada ditambah minimal 10 truk lagi. Sebab, sejak 2020 hingga sekarang, belum pernah pengadaan armada. Truk pengangkut sampah yang dimilikinya sekarang, usianya juga sudah tua. Praktis, kendaraan kerap rusak dan butuh biaya perbaikan. Walau demikian, Muchtar mengaku tidak akan patah arang. Dia akan selalu semangat dan memaksimalkan anggaran yang ada. Prinsipnya kami akan melakukan pengelolaan sampah dengan baik supaya tidak menggunung dan tidak darurat sampah.

Dari data diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang *Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal*.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, identifikasi permasalahan adalah bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dari hasil observasi yang didapatkan beberapa permasalahan yaitu minimnya truk di TPS sehingga banyaknya sampah yang berserakan di badan-badan jalan serta kurangnya lokasi TPS disetiap daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada

tempat nya. Dari identifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal.

Perumusan masalah adalah bagian yang berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal ?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal sudah mencapai tingkat efektifitas yang sudah diterapkan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dan tantangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal dalam mengatasi permasalahan sampah.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akademik, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau

acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian

2. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kerangka Teori

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa referensi yang diambil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun tidak semua hasil penelitian dapat menjawab tujuan penelitian tentang Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Adapun Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh Rezky Putri Amelia Salinding, dkk (2016) dengan judul “Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado” penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengelolaan sampah di Kota Manado yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Kota Manado berjalan atau sebaliknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengelolaan sampah di Kota Manado belum efektif yang disebabkan minimnya kapasitas angkutan armada yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota Manado, sering terjadi keterlambatan pengangkutan dari TPS menuju TPA

menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS hal ini mempengaruhi keindahan kota, yang masih berserakan sampah di sudut-sudut kota dan pesisir pantai, sungai, yang masih menjadi pembuangan sampah dan limbah. Lokasi TPA juga belum secara maksimal dikelola dan ditata dengan baik.

Selain masalah umum yang telah ditemykan ternyata masih ada permasalahan lain yaitu adanya armada yang tidak layak pakai, kurangnya sarana dan prasarana berupa tempat sampah ditepi jalan, pasar dan tempat lain yang seharusnya memiliki tempat pembuangan sampah, kurangnya penyuluhan tentang sampah kepada masyarakat, jarak antara TPS dengan rumah masyarakat terlalu jauh sehingga masyarakat membuang sampah di sungai atau disembarang tempat. Untuk mengetahui efektifitas diukur dari beberapa kriteria yaitu produksi, efesiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan selama 24 jam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ni Wayan Eni Winarsih, dkk (2019) yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar” menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak terkendali dan juga pertumbuhan penduduk desa secara alami cenderung meningkat. Hal ini mempengaruhi terhadap peningkatan konsumsi energi dan produksi sampah yang berdampak pada lingkungan. Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan aturan UU No 18 Tahun 2008 yaitu cara pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan 3 metode yaitu pembatasan timbulan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pendaur ulang (recycle). Sedangkan untuk penanganan sampah dengan cara 5 metode

yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pempeoesan akhir sampah. Cara pertama pengurangan sampah yaitu sampah yang menjadi volume besar adalah sampah organik atau sampah plastik oleh sebab itu Kota Denpasar membuat Perwali No.36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plasik, sampah plastik sebenarnya juga bernilai ekonomis jika dimanfaatkan kembali menjadi kerajinan dan dapat diperjual belikan untuk menghasilkan uang. Tidak hanya sampah plastik, sampah organik juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompas. Cara kedua penanganan sampah dapat dilakukan di TPS diolah terlebih dahulu sampah yang tidak dapat didaur ulang kemudian dibawa ke tempat TPS, ini akan mengurangi timbunan volume terhadap penumpukan sampah.

Relevansi dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah daur ulang sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah.

II.2 Definisi Konsep

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menanyakan seberapa jauh target (kualitas dan kuantitas) yang telah dicapai oleh seseorang yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektifitas adalah

hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat bahwa efektifitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atas jasa yang diberikannya.

Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Teori efektifitas Jones (2007) digunakan sebagai kerangka acuan dalam proses analisis dan pembahasan. Dalam teorinya, Jones mengemukakan tiga aspek utama dalam evaluasi efektifitas yang meliputi kemampuan pengelolaan sumber daya, kemampuan operasional dan fungsi program, serta kemampuan pemenuhan layanan bagi komunitas yang ditargetkan.

Teori yang mengacu pada efektifitas yaitu pendapat beberapa ahli tentang pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas

adalah teori sistemik didasarkan pada asumsi bahwa organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Sistem adalah seperangkat atau kumpulan bagian-bagian yang bergerak saling bergantung yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gibson, teori sistem menekankan elemen inti input-proses-output untuk melindungi dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi.

Efektifitas pengelolaan adalah dimana efektif merupakan pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan, maka efektif bisa diartikan sebagai pemilihan terhadap pengelolaannya dan cara mengelolanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Jadi efektifitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal.

2. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektifitas bukanlah salah satu hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktifitas, maka seseorang manager produksi memberikan

pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun Indikator Efektifitas menurut Sugiyono dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
2. Sosialisasi, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih

maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Sosialisasi penanganan sampah sudah dilakukan namun masih kurangnya perhatian dari masyarakat setempat.

3. Pemantauan, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari, pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang dkk menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

3. Tata Pengelolaan sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Menurut definisi WHO (*World Health Organization*) sampah ialah suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang bersumber dari aktifitas atau kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Dobiki, 2018).

Sampah ialah suatu benda yang berbentuk padat dan berkaitan dengan aktifitas atau kegiatan manusia, yang sudah tidak digunakan lagi dan juga tidak disenangi serta dibuang dengan cara-cara yang dapat diterima oleh kalangan umum oleh sebab itu perlu pengelolaan yang baik dan benar (Arbi, 2019).

Menurut Waste Management (2021), pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan atau bahan yang

ditolak. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Dari beberapa pengertian mengenai sampah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah segala bentuk sisa dari kegiatan atau aktifitas sehari-hari manusia yang berbentuk padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang sudah tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang.

Adapun tata cara pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yaitu :

1. Memilah sampah yaitu memilah antara sampah organik dan sampah anorganik.
2. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos.
3. Mendaur ulang sampah anorganik kering.
4. Mengelola sampah berbahaya.
5. Meminimalisir sampah plastik.

Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, karena hal ini merupakan isu multisektor yang berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat dan ekonomi. Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan isu kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan

sumberdaya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan (UNEP, 2015). Namun, pengelolaan sampah juga dapat dianggap sebagai ‘penghambat sistem’. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat (Sahil, 2016).

Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) atau pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi menurut Van de Klundert dan Anschutz (2001) dalam Wilson et al (2013) merupakan konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu stakeholders, elemen sistem limbah, dan aspek strategis. Selain tiga dimensi tersebut, kebijakan pengelolaan sampah di setiap negara juga menjadi landasan dalam pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Stakeholders memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi tantangan mengenai bagaimana membuat suatu kesepakatan antar stakeholders untuk bersinergi dalam mencapai tujuan bersama diluar kepentingannya masing-masing. Stakeholders yang terlibat bisa berupa LSM, sektor privat formal dan informal, penduduk lokal, dan lainnya.

Dimensi kedua yaitu elemen sistem limbah atau bisa disebut sebagai serangkaian tahap dalam pengelolaan material sampah. Dalam proses ini, penting untuk dibuat rencana pengelolaan sampah (waste management plan) agar mekanisme pengelolaan dapat lebih terstruktur. Dimensi kedua

mencakup pengumpulan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengurangan sampah, pemakaian kembali, daur ulang, pemulihan dan pembuangan sampah di TPA.

Dimensi ketiga yaitu enam aspek strategis yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh ISWM meliputi :

1. Aspek finansial-ekonomi, berkaitan dengan penganggaran biaya dalam sistem pengaturan sampah, dampak jasa lingkungan terhadap ekonomi, efisiensi sistem pengaturan sampah perkotaan, dimensi makroekonomi dalam penggunaan sumber daya, serta penghasilan yang bisa diperoleh dari ISWM.
2. Aspek lingkungan, fokus pada efek dari pengelolaan sampah di tanah, air dan udara.
3. Aspek politik, berkaitan dengan 'batas-batas politis' dalam pengelolaan sampah, seperti kerangka hukum dan peraturan yang telah ada, proses pengambilan keputusan, serta penentuan peran.
4. Aspek institusional atau lembaga, berhubungan dengan struktur sosial dan politik yang mengontrol pengelolaan sampah, seperti pembagian fungsi dan tanggungjawab insitusi yang bersangkutan, prosedur dan metode yang diterapkan, serta ketersediaan kapasitas institusional.
5. Aspek sosial budaya berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap adanya timbulan sampah, perbedaan pengelolaan di setiap rumah

tangga, bisnis, dan institusi, serta keterlibatan dari komunitas-komunitas terhadap pengelolaan sampah.

6. Aspek teknis berkaitan dengan mekanisme teknis pengelolaan sampah yang dipengaruhi oleh karakteristik sampah, kuantitas sampah, dan kondisi lokal.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan konsep 3R yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program menggunakan kembali (reuse), mengurangi (reduce), dan mendaur ulang (recycle).

Penjelasan dari 3R yaitu sebagai berikut :

1. Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain
2. Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. Recycle (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, diperlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah adalah menerapkan prinsip 3R.

4. Landasan Hukum Pengelolaan Sampah

Landasan hukum pengelolaan sampah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (I) sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja
- b. Sampah jenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lain sebagainya.
- c. Sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

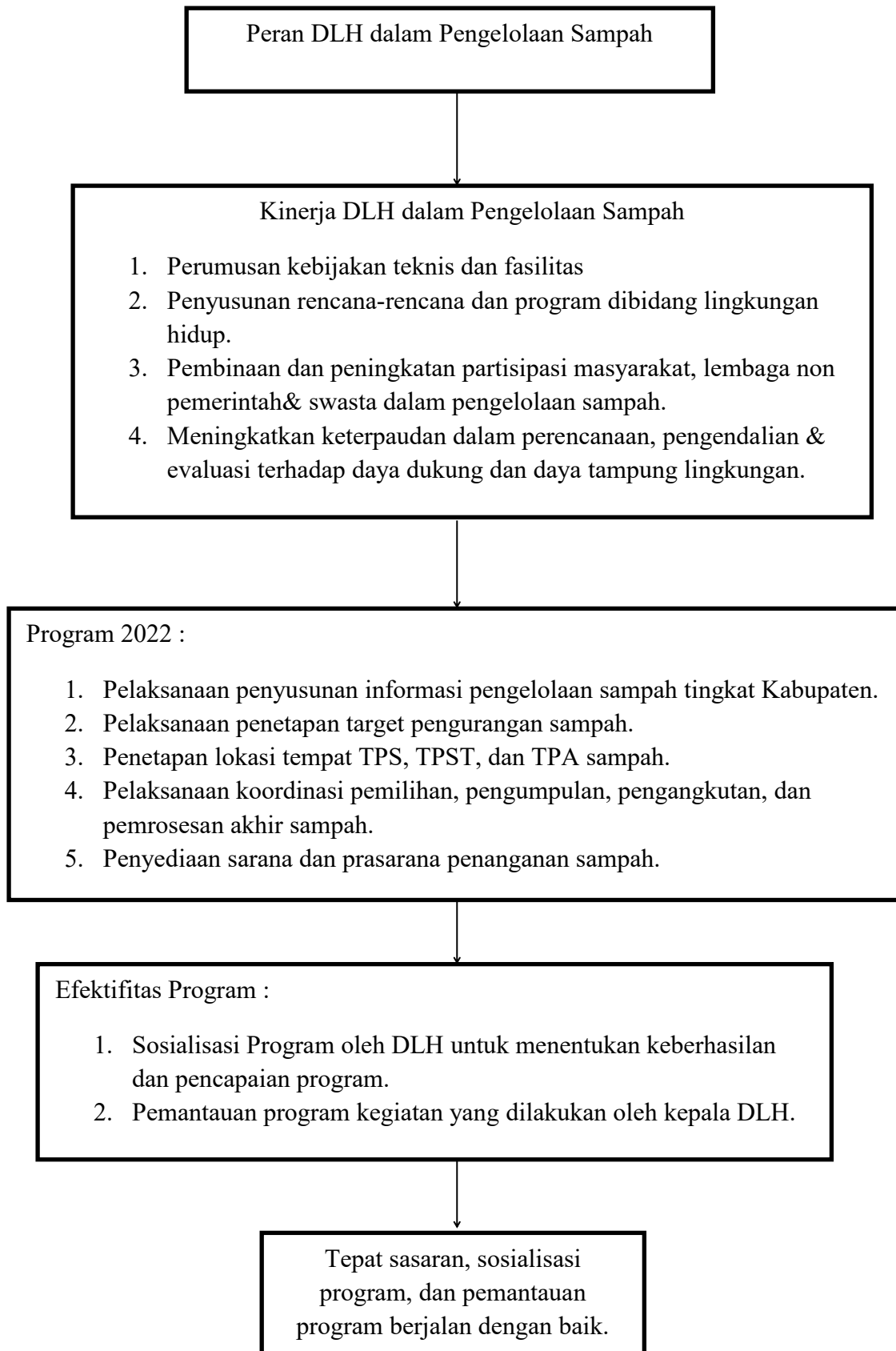
II.3 Pokok Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan pokok penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimanakah efektifitas pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Tegal dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Tegal.

II.4 Alur Pikir

Alur pikir dalam penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teori yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan, dengan demikian sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Alur Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sugiono (2012:9) mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pemahasan hasil penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenology, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

III.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai sumber data dan informasi untuk membantu peneliti dalam penelitian tentang “*Efektifitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Tegal*”

III.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dari wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal maupun tenaga pengelolaan sampah yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar wilayah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang mendukung dan berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

III.4 Informan Penelitian

Penentuan informan didalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
2. Penyuluh Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah.
3. Kepala UPTD Pemrosesan akhir sampah dan limbah.
4. Pengadministrasi umum UPTD Pemrosesan akhir sampah dan limbah.

5. Pegawai Lapangan Bagian Pengelolaan Sampah.

6. Masyarakat

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah :

a. Observasi

Observasi yang meliputi pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung, dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat sehingga interaksi peneliti dengan subjek peneliti bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau diskusi langsung adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan pihak terkait dalam mengumpulkan data informasi guna mempercepat dan mengkonkritkan informasi yang dikumpulkan. Narasumbernya adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan pengelola sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti akan melakukan kajian terhadap bahan tertulis yang menjadi dokumen dan tersimpan dalam sistem kearsipan.

III.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data tentang program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, kemudian data tersebut dianalisis dan ditampilkan untuk penyusunan teori. Peneliti melakukan pengumpulan data mengenai program pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal agar mendapat data yang valid dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penulisan dalam pengelolaan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

Miles dan Hiberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. Model Data (display data)

Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sebagainya. Meles dan Heberman (1984) juga mengatakan bahwa hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu, display data juga berupa grafik, matriks, network (jejaring sosial).

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan awal yang telah dibuat masih bersifat sementara dan akan berubah tergantung pada bukti-bukti data. Namun, bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut bisa dikatakan kredibel (bisa dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, hingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

IV.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

1. Visi

Menjadi Instansi yang Handal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

2. Misi

- a. Meningkatkan peran aktif dan pengetahuan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

IV.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mendasari peraturan Bupati Tegal nomor 30 tahun 2021, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan hidup memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pengembangan sarana dan teknologi Bidang Lingkungan Hidup

- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah 30 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 seksi yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, b) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 seksi yaitu : a) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, b) Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
 - 3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (B3), terdiri dari 3 seksi, yaitu : a) Seksi Pengurangan Sampah, b) Seksi Penanganan Sampah, c) Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- 1) UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A terdiri dari : a) Kepala UPTD, b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
- f. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B

Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal BAB IV Pasal 7 menyatakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pemerintah Daerah :
- 1) Melakukan pengumpulan sampah skala Kabupaten

- 2) Menyediakan TPS dan atau TPS-3R skala Kabupaten
 - 3) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan atau TPS-3R ke TPA atau TPST
 - 4) Melakukan pemilahan sampah skala Kabupaten
 - 5) Mendorong pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk melakukan pemilahan sampah
 - 6) Menyediakan sarana dan prasarana pemilah skala Kabupaten
 - 7) Melakukan pemrosesan akhir sampah
 - 8) Menyediakan dan mengoperasikan TPA
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah :
- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi serta memuat arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha dan pihak lain
 - 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir

- 5) Menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah

Tugas dan Kewenangan Kecamatan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Kecamatan antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di 2 atau lebih wilayah Desa/Kelurahan dalam 1 Kecamatan agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah
- 2) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam 1 wilayah Kecamatan dalam pengelolaan sampah

b. Kewenangan Kecamatan antara lain :

- 1) Menyusun raencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya
- 2) Monitoring dan evaluasi program Desa yang terkait dengan pengelolaan sampah
- 3) Memberi arahan atau dorongan kepada Desa yang tidak atau belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik
- 4) Melaporkan hasil monitorin dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa kepada Pemerintah Daerah

Tugas dan kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan antara lain :

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga
- 2) Menyediakan sarana pemilahan sampah skala Desa/Kelurahan
- 3) Menyediakan paling sedikit 1 TPS dan atau TPS 3R di wilayahnya
- 4) Melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan atau TPS 3R
- 5) Menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan atau TPS 3R
- 6) Mendorong kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di Desa/Kelurahan agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah

b. Kewenangan Pemerintah Desa antara lain :

- 1) Menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kebijakan wilayahnya
- 2) Mengalokasikan pendanaan pengelolaan sampah dalam APBDes
- 3) Membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk bergerak dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangaa

- 4) Melaporkan upaya-upaya dan hasil kegiatan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan Camat

Tugas dan kewenangan pelaku usaha sebagai produsen dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Tugas pelaku usaha sebagai produsen adalah :

- 1) Melakukan upaya pembatasan timbulan sampah sebagai akibat proses usahanya
- 2) Melakukan upaya pengumpulan dan pemilahan sampah
- 3) Melakukan pendaur ulang sampah
- 4) Bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin usaha pengumpulan dan pendaur ulang sampah

b. Kewenangan pelaku usaha sebagai produsen adalah :

- 1) Menyusun program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari proses produksi
- 2) Menyusun program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari proses produksi
- 3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah
- 4) Melaporkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah kepada Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup.

Tugas pelaku usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam pengelolaan sampah antara lain :

- a. Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah
- b. Menyediakan sarana pengumpulan berupa TPS dan atau TPS 3R serta sarana prasarana pemilahan sampah
- c. Mengupayakan peningkatan kesadaran dan perhatian warga yang berada dalam kawasan dan fasilitas tersebut untuk melakukan pengurangan sampah

Kewenangan pelaku usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam pengelolaan sampah antara lain

- a. Melakukan pembinaan kepada warga yang berada di kawasan atau fasilitasnya yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan benar
- b. Melaporkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di kawasan atau fasilitasnya kepada Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup

3. Struktur Organisasi

